



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN **2022**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 35A
Mlajah, Bangkalan

www.bappeda.bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung

kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, Februari 2023

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN**



EKO SETIAWAN, S.Si., MT
Pembina Tk. I

NIP. 19751121 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	3
D. Landasan Hukum	4
E. Sistematika	5
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	11
BAB III.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran	41
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
BAB IV.....	44
PENUTUP.....	44
LAMPIRAN.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

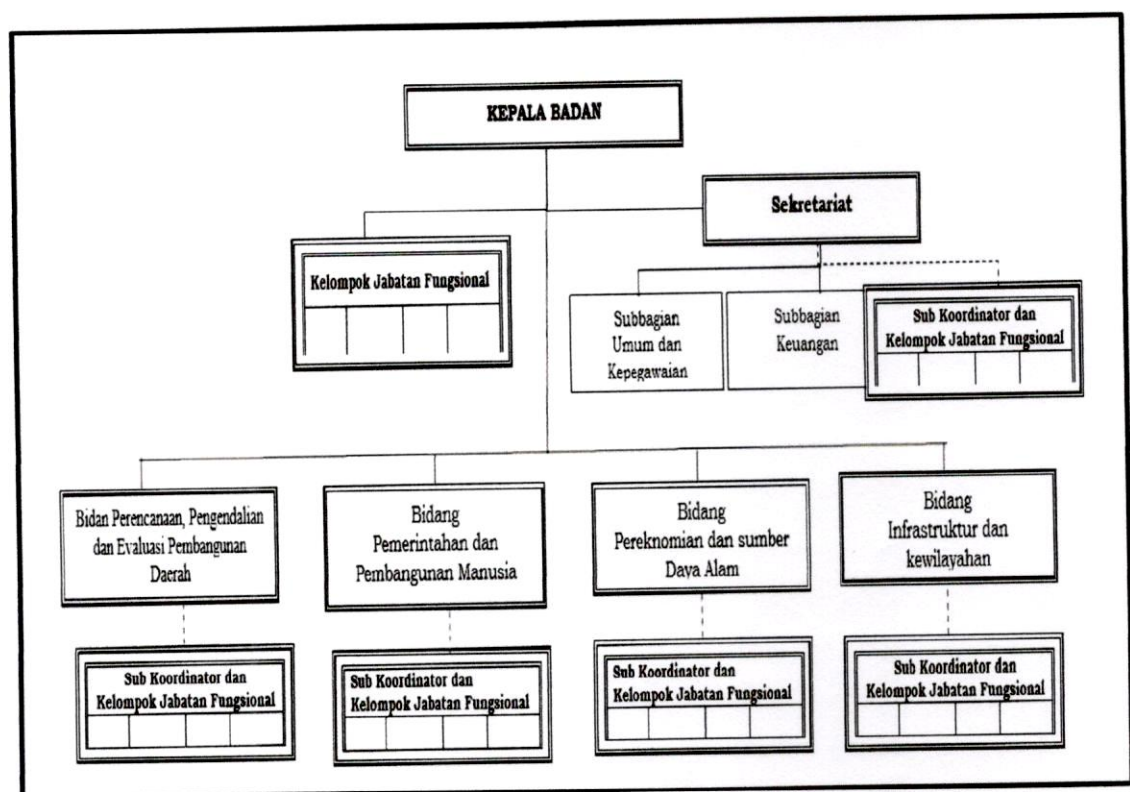
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan administrasi dinas di bidang perencanaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan kedisiplinan pengumpulan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Peningkatan SDM perencana melalui bimbingan teknis;
3. Peningkatan koordinasi antar pelaku yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan kedisiplinan pengumpulan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Peningkatan koordinasi antar pelaku yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Visi Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Berkualitas.
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi.
3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada Misi ke-2, yaitu:

“Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 2 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Kinerja pada Tahun		
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	59,62	69,23	-	-	-
			Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja program	98	88,89	85	87	88
			Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	80	67,50	79	80	81

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Kinerja pada Tahun		
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	82,32	78,17	87	88	89

Sumber: Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA
	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	%	Nilai Perencanaan Kinerja berdasarkan Evaluasi SAKIP		Bappeda Kab. Bangkalan
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	1.1 Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	%	$\frac{\sum \text{Indikator Kinerja Outcome yang tercapai}}{\sum \text{Indikator Kinerja Outcome}}$	X 100%	Bappeda Kab. Bangkalan
		1.2 Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	%	$\frac{\sum \text{Indikator RPJMD yang capaiannya sama dengan atau lebih dari 80\%}}{\sum \text{Seluruh Indikator RPJMD}}$	X 100%	Bappeda Kab. Bangkalan
	Meningkatkan Kinerja Urusan Perencanaan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan Program Urusan Perencanaan	%	Rata-Rata realisasi program		Bappeda Kab. Bangkalan
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	1.1 Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	%	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan		Bappeda Kab. Bangkalan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	%	87,00
			Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	%	80,00
2	Meningkatkan Kinerja Urusan Perencanaan	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	%	88,00

Sumber: Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Tahun 2022. Pada tanggal 11 November 2022 ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	87%
		Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	80%
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	88%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	96,50%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8	laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	57	orang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400	laporan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	12	laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18	laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	7	laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90	buah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,33%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	106	unit
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2101	unit
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140	unit
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	4	jenis
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	kali
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138	kali
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	jenis
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	jenis
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	jenis
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	91,67%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	27	unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	87	unit
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	RATA-RATA PERSENTASE KESELARASAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN	80%	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100%	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan Pelaksanaan CSR/TSLP	1	laporan
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik	2	laporan
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum SKPD/Lintas SKPD	2	laporan
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD	1	laporan
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1	laporan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	3	dokumen
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterisian Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	56%	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	dokumen
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1	laporan
	Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	laporan
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1	dokumen
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana	100%	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	laporan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	16	laporan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH DENGAN PERENCANAAN KINERJA BERKUALITAS BAIK	98,08%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	97,60%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan yang tersusun	2	dokumen laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Pemerintahan	48	dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan yang tersusun	1	dokumen laporan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun	2	dokumen laporan
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Kependudukan yang tersusun	2	dokumen laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub.Bidang Kependudukan	10	dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub.Bidang Pendidikan dan Kesehatan	8	dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bid Kependudukan yang tersusun	1	dokumen
	Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun	2	dokumen laporan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	100%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata yang tersusun	2	dokumen laporan
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun	2	dokumen laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata	6	dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro	8	dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun	2	dokumen laporan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun	2	dokumen laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan	8	dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun	1	dokumen
	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersusun	1	dokumen laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	100%	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tersusun	2	dokumen laporan
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tersusun	2	dokumen laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	6	dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersusun	1	dokumen
	Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun	2	dokumen laporan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan Yang tersusun	2	dokumen laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub bidang kewilayahan	4	dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan yang tersusun	1	dokumen
	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	1	dokumen laporan

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Penggeseran Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bangkalan yang ke-2.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tahun 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja Program	87,00	86,32	99,22	Sangat Tinggi	Bappeda Kab. Bangkalan
		Persentase indicator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	80,00	85,71	107,13	Sangat Tinggi	Bappeda Kab. Bangkalan
2	Terpenuhinya Pelayanan Keseekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Keseekretariatan	88,00	85,44	97,09	Sangat Tinggi	Bappeda Kab. Bangkalan

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator kinerja “rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja Program” mendapat kategori **“Sangat Tinggi”** dengan capaian kinerja sebesar 99,22%. Hal ini disebabkan karena adanya asistensi dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan monitoring atas evaluasi kinerja triwulan yang disampaikan.
2. Indikator kinerja “Persentase indicator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%” mendapat kategori **“Sangat Tinggi”** dengan capaian kinerja sebesar 107,13%. Hal ini secara umum telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik atas realisasi capaian indicator kinerja daerah.
3. Indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan” mendapat kategori **“Sangat Tinggi”** dengan capaian kinerja sebesar 97,09%. Hal ini dikarenakan terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dalam tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	21,24	21,50	21,40	23,51	22,20	94,42
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	59,62	69,23	-	-	-	-
		Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	98,00	88,89	79,37	87,00	86,32	99,21
		Persentase indicator kinerja RPJMD dengan	80,00	67,50	76,19	80,00	85,71	107,13

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
2	Meningkatkan Kinerja Urusan Perencanaan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan	-	-	82,47	91,53	89,13	97,37
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	82,32	78,17	78,60	88,00	85,44	97,09

Uraian penjelasan tabel:

1. Realisasi indikator Kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP” dari tahun 2019 – 2021 mengalami fluktuatif, yang mana pada tahun 2021 turun sebesar 0,1%. Penurunan ini berdasarkan catatan hasil evaluasi KemenpanRB dikarenakan perbaikan kualitas perencanaan kinerja belum signifikan sehingga sasaran dan indikator kinerja lebih berorientasi hasil. Pada tahun 2022 realisasinya sebesar 22,2% dengan capaian 94,42%. Capaian pada tahun 2021 dengan tahun 2022 tidak dapat disandingkan karena berdasarkan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.
2. Realisasi indikator kinerja “Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik” dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2021 indikator tersebut tidak dipakai lagi dikarenakan adanya nomenklatur baru yang harus disesuaikan, dan hasil dari asistensi indikator kinerja berubah menjadi Rata-rata persentase ketercapaian Indikator Kinerja Program. Realisasi indikator rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja program dari tahun 2021 - 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,95%. Hal ini disebabkan karena adanya asistensi dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan monitoring atas evaluasi kinerja triwulan yang disampaikan.

3. Realisasi indikator kinerja “Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%” dari tahun 2019 – 2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 realisasi sebesar 67,5% dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan refocusing anggaran sehingga beberapa kegiatan di semua Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan tidak dilaksanakan sehingga berpengaruh pada penurunan kinerja indikator daerah, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 realisasinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini secara umum telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik atas realisasi capaian indikator kinerja daerah.
4. Realisasi indikator kinerja “Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan” baru ada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 82,47%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,66%. Hal ini disebabkan realisasi program dalam urusan perencanaan sudah mencapai target sehingga mengalami peningkatan yang cukup baik.
5. Realisasi indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan” dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif. Dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun belum mencapai target.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	22,20	24,34	91,20

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	86,32	88,00	98,09
		Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	85,71	79,00	108,49
2	Meningkatkan Kinerja Urusan Perencanaan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan	89,13	95,00	93,82
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	85,44	87,00	98,20

Uraian penjelasan tabel:

1. Tingkat kemajuan indikator kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP” sebesar 91,20%.
2. Tingkat kemajuan indikator kinerja “Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program” sebesar 98,09%.
3. Tingkat kemajuan indikator kinerja “Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%” sebesar 108,49%.
4. Tingkat kemajuan indikator kinerja “Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan” sebesar 93,82%.
5. Tingkat kemajuan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan” sebesar 98,20%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui perencanaan pembangunan yang efektif	Nilai perencanaan kinerja daerah dalam mendukung nilai SAKIP	22,20	30	74
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	86,32	-	-
		Persentase indicator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	85,71	-	-
2	Meningkatkan Kinerja Urusan Perencanaan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan	89,13	-	-
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indek Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	85,44	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	23,51	22,20	94,42	Telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP	Menyusun penjenjangan kinerja baik tingkat kabupaten maupun Perangkat Daerah
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	87,00	86,32	99,21	Capaian indikator kinerja program perangkat daerah sudah cukup baik	Memonitoring evaluasi renja perangkat daerah
		Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	80,00	85,71	107,13		
2	Meningkatkan Kinerja Urusan Perencanaan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan	91,53	89,13	97,37		
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	88,00	85,44	97,09	Pelayanan internal kesekretariatan yang diberikan sudah cukup baik	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan baik

Uraian penjelasan tabel:

1. Capaian indikator kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP” sebesar 94,42%.
2. Capaian indikator kinerja “Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program” sebesar 99,21%.
3. Capaian indikator kinerja “Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%” sebesar 107,13%.
4. Capaian indikator kinerja “Persentase Ketercapaian Kinerja Program U rusan Perencanaan” sebesar 97,37%.

5. Capaian indikator kinerja "Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan" sebesar 97,09%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Terpenuhi nya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	97,09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	90.22	Menunjang
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Kinerja SKPD yang disusun		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	Menunjang
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	99.28	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	96.5	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	100	Menunjang
3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	Menunjang
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	100	Menunjang
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	Menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Menunjang
5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.06	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.23	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.1	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.57	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	
7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Menunjang
8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	109.09	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100	Menunjang
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100	Menunjang
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	99,21	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	100	Menunjang
1				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan yang disusun	100	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Bidang Pemerintahan	Asistensi lingkup Sub Bidang Pemerintahan		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang pemerintahan yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Kependudukan yang tersusun	100	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub.Bidang Pendidikan dan Kesehatan	100	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Sub.Bidang Kependudukan		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bid Kependudukan yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Laporan perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia yang tersusun	100	Menunjang
2				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata yang tersusun		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro	100	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata	100	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun	100	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Asistensi lingkup Sub.Bidang Pertanian dan Perikanan		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah sub bidang pertanian dan perikanan yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun	100	Menunjang
3				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tersusun		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	100	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	100	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan Yang tersusun	100	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub bidang kewilayahan	100	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	100	Menunjang
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Persentase indicator kinerja RPJMD dengan capaian	107,13	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Rata-rata persentase keselarasan antar dokumen	102,81	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
		hasil minimal 80%		PEMBANGUNAN DAERAH	perencanaan dan perencanaan dengan pelaksanaan		
1				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	66.67	Menunjang
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan Pelaksanaan CSR/TSLP	100	Menunjang
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Forum Konsultasi Publik	100	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Forum SKPD/Lintas SKPD	100	Menunjang
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD/RPJMD	100	Menunjang
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Musrenbang Kecamatan	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	100	Menunjang
2				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterisian Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	108.82	Menunjang
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Pembangunan Daerah		
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	100	Menunjang
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Menunjang
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	100	Menunjang
3				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana	87.5	Menunjang
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	Menunjang
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	Menunjang

Uraian penjelasan tabel:

- Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja rata-rata sudah mencapai 100% meskipun ada beberapa indicator kinerja yang masih belum mencapai target.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kinerja “Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana” tidak terlaksana karena terlambatnya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan.
- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan indikator kinerja “Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu” dengan capaian 66,67% dikarenakan adanya keterlambatan penyusunan P-RKPD dalam penyesuaian atas asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang membutuhkan waktu yang panjang terutama pemenuhan data yang akurat dan *update*.
- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana” dengan capaian sebesar 87,5% dikarenakan adanya keterlambatan perangkat daerah dalam pengumpulan laporan evaluasi RKPD/Renja dan DAK.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.062.239.000	906.805.171	85.37
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	283.297.000	211.022.330	74.49

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	183.432.000	169.012.450	92.14
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	595.510.000	526.770.391	88.46
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.848.300.150	1.660.316.294	89.83
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.416.956.150	1.249.821.300	88.2
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	376.930.250	363.038.544	96.31
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	54.413.750	47.456.450	87.21
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.838.672.085	6.606.104.076	96.6
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.694.250	10.091.950	94.37
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.182.482.635	5.088.540.340	98.19
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.453.800	2.444.300	99.61
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.360.000	91.189.400	99.81
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.650.750	245.992.678	89.57
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.370.500	0	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.035.010.150	942.629.077	91.07
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.650.000	225.216.331	95.57

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
I	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	23,51	22,20	94,42	2.910.539.150	2.567.121.465	88.2	6,22
1	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	87,00	86,32	99,21	1.062.239.000	906.805.171	85,36	13,85
2	Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	80,00	85,71	107,13	1.848.300.150	1.660.316.294	89,82	17,31
II	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan	91,53	89,13	97,37	6.838.672.085	6.606.104.076	96.59	0,78
1	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	88,00	85,44	97,09	6.838.672.085	6.606.104.076	96.59	1,00

Uraian penjelasan tabel:

- Tingkat efisiensi untuk indikator tujuan “Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP” sebesar 6,22%.
- Tingkat efisiensi untuk indikator sasaran “Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja program” sebesar 13,85%.
- Tingkat efisiensi untuk indikator sasaran “Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%” sebesar 17,31%.
- Tingkat efisiensi untuk indikator tujuan “Persentase ketercapaian kinerja program urusan Perencanaan” sebesar 0,78%.
- Tingkat efisiensi untuk indikator sasaran “Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan” sebesar 1%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan 1

Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif dengan indikator kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP” dengan capaian kinerja sebesar 94,42% (kategori Sangat Tinggi).

- ✚ Sasaran 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dengan indicator kinerja:
 - Rata-rata persentase ketercapaian indicator kinerja program dengan capaian kinerja sebesar 99,21% (kategori Sangat Tinggi).
 - Persentase indicator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80% dengan capaian kinerja sebesar 107,13 (kategori Sangat Tinggi).
- Tujuan 2:

Meningkatkan kinerja urusan perencanaan dengan indikator kinerja “Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan” dengan capaian sebesar 97,37% (kategori Sangat Tinggi).
- ✚ Sasaran 1: Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indicator kinerja:
 - Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan dengan capaian kinerja sebesar 97,09% (kategori Sangat Tinggi).

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.749.211.235,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.173.225.541,-. Dengan demikian, dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 94,09% dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 5,91%. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

B. Tindak Lanjut

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat atas laporan hasil evaluasi AKIP dengan Nomor X.700/129/PI/433.206/2022 Tanggal 17 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dengan memberikan apresiasi dalam bentuk Piagam atas capaian kinerja yang terbaik.
2. Telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan aplikasi **BANGAKIP**.
3. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sebagaimana tersaji dalam bab 3, bahwa pencapaian kinerja yang dilakukan telah memberikan tingkat efisiensi anggaran yang cukup baik atas capaian anggaran yang digunakan.

Bangkalan, Februari 2023

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN**



EKO SETIAWAN, S.Si., MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19751121 200312 1 003

LAMPIRAN

**SK TIM SAKIP
PERANGKAT DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 35A Telp. (031) 3095482 Fax. (031) 3096482 Kode Pos 69116

Website : bappeda.bangkalankab.go.id | Email : bappeda@bangkalankab.co.id

BANGKALAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 188.4/008/Kpts/433.201/2022

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (SAKIP)

DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
- b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.

- KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN



EKO SETIAWAN, S.Si., MT
Pembina Tk. I
NIP. 19751121 200312 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188.4/008 /Kpts/433.201/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NO	JABATAN DALAM TIM	PEJABAT
1.	Penanggungjawab	Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan
2.	Ketua	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bangkalan
3.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 6. Kasubbag Keuangan 7. Pengelola Bahan Perencanaan

 **KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN**
EKO SETIAWAN, S.Si., MT
Pembina Tk. I
NIP. 19751121 200312 1 003

MATRIKS RENSTRA

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Pemanfaatan Pembangunan yang Efektif				Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP			20,68%		22,63%	3.278.397.202,00	23,51%	4.544.871.688,00	24,34%	4.150.000.000,00	24,34%	11.973.268.890,00	
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif			Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program			75,00%		85,00%	1.496.006.877,00	87,00%	1.843.662.731,00	88,00%	2.150.000.000,00	88,00%	5.481.669.608,00	
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik			44,23%		73,08%	1.496.006.877,00	98,08%	1.843.662.731,00	100,00%	2.150.000.000,00	100,00%	5.481.669.608,00	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik			63,64%		100,00%	387.804.110,00	100,00%	405.814.364,00	100,00%	500.000.000,00	100,00%	1.298.618.474,00	
		5.01.03.2.02.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun		3	Laporan	7.934.950					3	Laporan	7.934.950,00
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun					2	Dokumen Laporan	9.374.750	2	Dokumen Laporan	10.026.724,00	19.401.474,00
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata yang tersusun					2	Dokumen Laporan		2	Dokumen Laporan		
		5.01.03.2.02.02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun		2	Dokumen	209.520.799					2	Dokumen	209.520.799,00
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro					8	Dokumen	16.509.700	8	Dokumen	10.676.241	27.185.941,00
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata					6	Dokumen		6	Dokumen		
		5.01.03.2.02.03				Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun		0	Dokumen Laporan						0	Dokumen Laporan	

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun				1	Dokumen Laporan	1	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata yang tersusun				1	Dokumen Laporan	1	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan
		5.01.03.2.02.04				Jumlah Dokumen Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun	2	Dokumen Laporan	36.616.910					2	Dokumen Laporan
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Keuangan dan pariwisata yang tersusun				1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun				1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen
						Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun				2	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan	4	Dokumen Laporan
		5.01.03.2.02.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	3	Dokumen Laporan	6.417.850					3	Dokumen Laporan
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun				2	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan	4	Dokumen Laporan
		5.01.03.2.02.06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	1	Dokumen	112.871.048,00					1	Dokumen
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan				8	Dokumen	8.000.000,00	8	Dokumen	23.879.688,00
		5.01.03.2.02.07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	0	Dokumen Laporan	-					0	Dokumen Laporan
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun				1	Dokumen Laporan	8.000.000,00	1	Dokumen Laporan	20.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)			
								9	10	11	12	13	14	15	16			
		5.01.03.2.02.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	1	Dokumen Laporan	14.442.553					1	Dokumen Laporan	14.442.553,00		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun			1	Dokumen	138.224.013	1	Dokumen	200.728.271,00	2	Dokumen	338.952.284,00	
						Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersusun			1	Dokumen Laporan		1	Dokumen Laporan		2	Dokumen Laporan		
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik			29,41%	58,82%	490.295.567,00	97,06%	487.848.367	100,00%	700.000.000,00	100,00%	1.678.143.934,00			
		5.01.03.2.01.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPIMD dan RKPD)	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang tersusun	3	Dokumen Laporan	13.826.803,00					3	Dokumen Laporan	13.826.800,00		
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan yang tersusun			2	Dokumen Laporan	16.386.900,00	2	Dokumen Laporan	15.386.414,00	4	Dokumen Laporan	31.773.314,00	
		5.01.03.2.01.02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang tersusun	1	Dokumen	118.100.600,00					1	Dokumen	118.100.600,00		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Pemerintahan			24	Dokumen	19.788.600,00	24	Dokumen	15.577.000,00	48	Dokumen	35.365.600,00	
		5.01.03.2.01.03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Yang tersusun	1	Dokumen Laporan	11.707.200,00					1	Dokumen Laporan	11.707.200,00		
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan yang tersusun			1	Dokumen Laporan	5.840.250,00	1	Dokumen Laporan	10.859.111,00	2	Dokumen Laporan	16.699.361,00	
		5.01.03.2.01.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang tersusun	1	Dokumen	12.474.100,00					1	Dokumen	12.474.100,00		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sub bidang pemerintahan yang tersusun				1	Dokumen	116.260.400,00	1	Dokumen	166.260.400,00	2	Dokumen	282.520.800,00
						Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan yang tersusun				1	Dokumen Laporan		1	Dokumen Laporan		2	Dokumen Laporan	

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		5.01.03.2.01.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	6	Dokumen Laporan	19.739.250,00					6	Dokumen Laporan	19.739.250,00	
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun				2	Dokumen Laporan	23.448.250,00	2	Dokumen Laporan	4	Dokumen Laporan	47.596.359,00
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Kependudukan yang tersusun				2	Dokumen Laporan		2	Dokumen Laporan	4	Dokumen Laporan	
		5.01.03.2.01.06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	2	Dokumen	231.408.550,00					2	Dokumen	231.408.550,00	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub. Bidang Pendidikan dan Kesehatan				4	Dokumen	69.912.350,00	4	Dokumen	8	Dokumen	97.919.238,00
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub. Bidang Kependudukan				5	Dokumen		5	Dokumen	10	Dokumen	
		5.01.03.2.01.07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	2	Dokumen Laporan	20.000.000,00					2	Dokumen Laporan	20.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub. Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun				1	Dokumen Laporan	7.308.650,00	1	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan	18.167.761,00
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub. Bidang Kependudukan yang tersusun				1	Dokumen Laporan		1	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan	
		5.01.03.2.01.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	2	Dokumen Laporan	63.039.067,00					2	Dokumen Laporan	63.039.067,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun				1	Dokumen	228.902.967,00	1	Dokumen	2	Dokumen	657.805.934,00
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Kependudukan yang tersusun				1	Dokumen		1	Dokumen	2	Dokumen Laporan	

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	
																9
						Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun				2	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan	4		
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INF-RASWIL) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik			85,71%	100%	619.907.200,00	100%	950.000.000,00	100%	950.000.000,00	100%	2.519.907.200,00	
		5.01.03.2.03.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	1	Dokumen Laporan	25.776.200,00					1	Dokumen Laporan	25.776.200,00
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tersusun				2	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan	4	Dokumen Laporan	100.000.000,00
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tersusun				2	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan	4	Dokumen Laporan	
		5.01.03.2.03.02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun	2	Dokumen	315.119.500,00					2	Dokumen	315.119.500,00
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup				6	Dokumen	6	Dokumen	12	Dokumen	150.000.000,00
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				4	Dokumen	4	Dokumen	8	Dokumen	
		5.01.03.2.03.03			Pelaksanaan Monitoring dan Evalueasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	1	Dokumen Laporan	1.863.500,00					1	Dokumen Laporan	1.863.500,00
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tersusun				1	Dokumen Laporan	1	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan	20.000.000,00
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersusun				1	Dokumen Laporan	1	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan	
		5.01.03.2.03.04				Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	1	Laporan	26.784.000,00					1	Laporan	26.784.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup				1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	750.000.000,00		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersusun				1	Dokumen	375.000.000,00	1	Dokumen	375.000.000,00		2	Dokumen
						Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun				2	Dokumen Laporan		2	Dokumen Laporan	4		Dokumen	
		5.01.03.2.03.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	1	Dokumen	7.484.000,00					1	Dokumen	7.484.000,00		
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan yang tersusun				2	Dokumen Laporan	17.899.081,00	2	Dokumen Laporan	17.899.081,00	4	Dokumen Laporan	
		5.01.03.2.03.06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun	1	Dokumen	211.240.000,00					1	Dokumen	211.240.000,00		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang Telah di Asistensi lingkup Sub bidang kewilayahan				4	Dokumen	61.900.919,00	4	Dokumen	61.900.919,00	8	Dokumen	
		5.01.03.2.03.07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	1	Dokumen Laporan	1.740.000,00					1	Dokumen Laporan	1.740.000,00		
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kewilayahan yang tersusun				1	Dokumen Laporan	10.200.000,00	1	Dokumen Laporan	10.200.000,00	2	Dokumen Laporan	
		5.01.03.2.03.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	1	Dokumen Laporan	29.900.000,00					1	Dokumen Laporan	29.900.000,00		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan yang tersusun				1	Dokumen	350.000.000	2	Dokumen	350.000.000	3	Dokumen	
						Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun				1	Dokumen Laporan		1	Dokumen Laporan	2	Dokumen Laporan		
				Presentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%			76,32%	79%	1.780.390.325,00	80%	2.701.208.957,00	81%	2.000.000.000,00	79%	6.481.599.282,00			

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata persentase keselarasan antar dokumen perencanaan dan perencanaan dengan pelaksanaan				79%	1.780.390.325,00	80,00%	2.701.208.957,00	88%	2.000.000.000,00	88%	6.481.599.282,00			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu			100%	100%	1.057.807.325,00	100%	1.475.000.000,00	100%	1.420.000.000,00	100%	3.952.807.325,00			
		5.01.02.2.01.02			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan Pelaksanaan CSR/TSLP	1	Laporan	4.950.200,00	1	Laporan	35.000.000,00	1	Laporan	45.000.000,00	84.950.200,00		
		5.01.02.2.01.03			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Forum Konsultasi Publik	1	Laporan	38.606.150,00	1	Laporan	75.000.000,00	1	Laporan	75.000.000,00	188.606.150,00		
		5.01.02.2.01.04			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Laporan	98.403.850,00	1	Laporan	150.000.000,00	1	Laporan	150.000.000,00	398.403.850,00		
		5.01.02.2.01.05			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD/RPJMD	1	Laporan	99.515.850,00	1	Laporan	225.000.000,00	1	Laporan	250.000.000,00	574.515.850,00		
		5.01.02.2.01.06			Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1	Laporan	35.993.000,00	1	Laporan	40.000.000,00	1	Laporan	50.000.000,00	125.993.000,00		
		5.01.02.2.01.07			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perda Perubahan RPJMD 2018 - 2023 P-RKPD Kab. Bangkalan RKPD Kab. Bangkalan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	1 1 1 1	Laporan Dokumen Dokumen Dokumen	780.338.275,00					1 1 1 1	Laporan Dokumen Dokumen Dokumen	2.580.338.275,00		
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterlaksanaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah			55%	55%	685.961.600,00	56%	1.026.208.957,00	58%	425.000.000,00	58%	2.137.170.557,00			
		5.01.02.2.02.01			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan Tim Percepatan Pembangunan Daerah	1 1	Dokumen Laporan	558.780.900,00	1	Dokumen	699.792.650,00	1	Dokumen	150.000.000,00	1.408.573.550,00		
		5.01.02.2.02.02			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1	Laporan	119.290.700,00	1	Laporan	257.098.650,00	1 1	Laporan Laporan	200.000.000,00	3 2	Laporan Laporan	576.389.350,00
		5.01.02.2.02.03			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1	Dokumen	7.890.000,00	1	Dokumen	69.317.657,00	1	Dokumen	75.000.000,00	3	Dokumen	152.207.657,00

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)			
								9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8											
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana				80%	36.621.400,00	100%	200.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	391.621.400,00			
		5.01.02.2.03.01			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	Laporan	-	1	Laporan	30.000.000,00	1	Laporan	25.000.000,00	2	Laporan	55.000.000,00
		5.01.02.2.03.03			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	14	Laporan	36.621.400,00	14	Laporan	170.000.000,00	14	Laporan	130.000.000,00	42	Laporan	336.621.400,00
Meningkatkan Kinerja Urusan Perencanaan				Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan				82,69%	6.449.857.842,00	91,53%	6.984.732.635,00	99%	7.429.604.323,00	90%	20.864.194.800,00			
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan			Indek Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan				87,00%	6.449.857.842,00	88,00%	6.984.732.635,00	89,00%	7.429.604.323,00	87,00%	20.864.194.800,00			
		5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan				96,00%	6.449.857.842,00	96,50%	6.984.732.635,00	97,00%	7.429.604.323,00	97,50%	20.864.194.800,00			
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	30.885.450,00	100,00%	31.259.532,00	100,00%	45.604.550,00	100,00%	107.749.532,00			
		5.01.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3	Dokumen	17.379.300,00	2	Dokumen	16.105.650,00	2	Dokumen	9.476.700,00	7	Dokumen	42.961.650,00
		5.01.01.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1.137.700,00	1	Dokumen	2.091.350,00	1	Dokumen	4.157.600,00	3	Dokumen	7.386.650,00
		5.01.01.2.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1.137.700,00	1	Dokumen	1.961.250,00	1	Dokumen	4.157.600,00	3	Dokumen	7.256.550,00
		5.01.01.2.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1.137.700,00	1	Dokumen	1.961.250,00	1	Dokumen	4.157.600,00	3	Dokumen	7.256.550,00
		5.01.01.2.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1.512.700,00	1	Dokumen	2.129.600,00	1	Dokumen	4.532.600,00	3	Dokumen	8.174.900,00
		5.01.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dokumen	5.601.700,00	1	Dokumen	2.443.082,00	1	Dokumen	7.459.100,00	3	Dokumen	15.503.882,00
		5.01.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8	Laporan	2.978.650,00	8	Laporan	4.567.350,00	8	Laporan	11.663.350,00	24	Laporan	19.209.350,00
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi				100%	4.409.243.126,00	100%	5.018.590.123	100%	5.009.015.123,00	100%	14.436.758.372,00			

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8								
		5.01.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	55	Orang	4.376.478.176,00	55	Orang	4.986.395.173,00	65	Orang	14.349.268.522,00
		5.01.01.2.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250	Laporan	1.696.000,00	400	Laporan	2.066.000,00	400	Laporan	8.448.000,00
		5.01.01.2.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	12	Laporan	1.272.200,00	12	Laporan	1.442.200,00	12	Laporan	7.536.600,00
		5.01.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Dokumen	27.390.100,00	1	Dokumen	27.390.100,00	1	Dokumen	61.060.300,00
		5.01.01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18	Laporan	2.406.650,00	18	Laporan	1.206.650,00	18	Laporan	10.444.950,00
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun				100%	3.095.800,00	100%	3.917.800,00	100%	10.545.800,00	100%	17.559.400,00
		5.01.01.2.03.01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	7	Laporan	1.398.600,00	7	Laporan	2.584.600,00	7	Laporan	7.531.800,00
		5.01.01.2.03.05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	1.697.200,00	7	Laporan	1.333.200,00	7	Laporan	10.027.600,00
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				100%	95.679.450,00	100%	115.890.000,00	100%	285.000.000,00	100%	496.569.450,00
		5.01.01.2.05.01			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	9.166.400,00	0	Unit	-	1	Unit	19.166.400,00
		5.01.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90	Buah	86.513.050,00	90	Buah	105.890.000,00	90	Buah	292.403.050,00
		5.01.01.2.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	0	Orang	-	5	Orang	25.000.000,00
		5.01.01.2.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	2	Orang	10.000.000,00	30	Orang	160.000.000,00
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				80%	342.282.149,00	80,33%	294.314.700,00	84%	326.779.700,00	84%	963.376.549,00
		5.01.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	145	Unit	17.427.350,00	119	Unit	15.309.950,00	150	Unit	52.737.300,00
		5.01.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	751	Unit	102.194.750,00	599	Unit	71.643.650,00	625	Unit	259.933.150,00
		5.01.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Unit	18.399.100,00	140	Unit	16.376.100,00	140	Unit	59.775.200,00
		5.01.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8	Jenis	32.169.949,00	12	Jenis	38.704.000,00	12	Jenis	91.087.899,00

Tajuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)	Target (K)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.01.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Jenis	8.100.000,00	4	Jenis	8.100.000,00	4	Jenis	22.680.000,00
		5.01.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Kali	7.753.000,00	10	Kali	4.690.000,00	15	Kali	20.196.000,00
		5.01.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Kali	156.238.000,00	30	Kali	139.491.000,00	50	Kali	451.967.000,00
		5.01.01.2.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang terusun	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	5.000.000,00
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				100%	197.568.450,00	100%	159.813.650,00	100%	150.000.000,00	100%	507.382.100,00
		5.01.01.2.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	81	Unit	197.568.450,00	15	Unit	159.813.650,00	25	Unit	507.382.100,00
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1.141.445.305,00	100%	1.146.546.180,00	100%	1.214.559.150,00	100%	3.502.550.635,00
		5.01.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Jenis	13.741.005,00	1	Jenis	17.366.300,00	1	Jenis	31.307.305,00
		5.01.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Jenis	141.550.600,00	3	Jenis	116.949.780,00	3	Jenis	397.859.530,00
		5.01.01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jenis	134.379.600,00	1	Jenis	157.890.000,00	1	Jenis	442.269.600,00
		5.01.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	Jenis	851.774.100,00	8	Jenis	854.340.100,00	8	Jenis	2.631.114.200,00
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana				100%	229.658.112,00	91.67%	214.490.650,00	92%	388.100.000,00	92%	832.248.762,00
		5.01.01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	20	Unit	85.544.913,00	27	Unit	113.850.650,00	27	Unit	415.795.563,00
		5.01.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8	Unit	33.013.905,00	1	Unit	37.800.000,00	1	Unit	104.413.905,00
		5.01.01.2.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang dipelihara	0	Unit	-	0	Unit	-	2	Unit	1.100.000,00
		5.01.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	79.353.644,00	1	Unit	39.090.000,00	1	Unit	218.443.644,00
		5.01.01.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	116	Unit	31.745.650,00	97	Unit	23.750.000,00	116	Unit	92.495.650,00
TOTAL									9.728.255.944,00		11.529.604.323,00		11.579.604.323,00		32.837.468.690,00

**SK PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Soekarno Hatta No. 35 A Telp. (031) 3095482 Fax. (031) 3096482
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 188.4/2023/Kpts/433.201/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2019 - 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D); ,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E).
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 27/D).
11. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD tanggal 4 November 2021, LD No. 1 Seri E, Noreg 217-2/2021.
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan Acuan Ukuran Kinerja dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal : November 2021



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN
 NOMOR : 188.4/2023 /Kpts/433.201/2021
 TANGGAL : November 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN
 TAHUN 2019-2023**

Tujuan								
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	Nilai Perencanaan Kinerja berdasarkan Evaluasi SAKIP	21,24	21,50	22,63	23,51	24,34	24,34
Meningkatkan Kinerja Urusan Perencanaan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan	Total target program PD Bappeda	-	-	82,69	91,53	95,00	90,00
		Jumlah Program PD Bappeda						


 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN BANGKALAN

 BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH

 EKO SETIAWAN, S.Si., MT
 NIP. 19781121 200312 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 188.4/ /Kpts/433.201/2021

TANGGAL : November 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN (LAMA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANJARNEGARA (Lampiran 1)

Sasaran									
Uraian	Indikator Sasaran dan Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target				Program
			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024	
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	1) Persentase Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja berkualitas baik}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$	63,46	65,38					
	1) Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja berkualitas baik Lingkup Bidang KOSDA}}{\sum \text{Perangkat Daerah Lingkup Bidang KOSDA}} \times 100\%$	81,82	81,82					Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	2) Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja berkualitas baik Lingkup Bidang PPM}}{\sum \text{Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM}} \times 100\%$	52,94	55,88					Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	3) Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja berkualitas baik Lingkup Bidang INFRASWIL}}{\sum \text{Perangkat Daerah Lingkup Bidang INFRASWIL}} \times 100\%$	85,71	85,71					Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	2) Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	$\frac{\sum \text{Indikator RPJMD yang capaiannya sama dengan atau lebih dari 80\%}}{\sum \text{Seluruh indikator RPJMD}} \times 100\%$	80,00	67,50					
	1) Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	$\frac{\sum \text{Indikator Kinerja Outcome yang tercapai}}{\sum \text{Indikator Kinerja Outcome}} \times 100\%$	98,00	88,89					Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	2) Rata-Rata Persentase keselarasan antar dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra-Renja)	$\frac{\sum \text{Program dalam RENSTRA yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program dalam RPJMD}} \times 100\%$	98,00	74,24					
		$\frac{\sum \text{Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program dalam RPJMD}} \times 100\%$							
		$\frac{\sum \text{Program dalam RENJA yang sesuai dengan RENSTRA}}{\sum \text{Program dalam RENSTRA}} \times 100\%$							
		$\frac{\sum \text{Program dalam RENJA yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program dalam RKPD}} \times 100\%$							
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	3) Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	Nilai Indek Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	82,32	78,17					
	1) Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	$\frac{\sum \text{Ketercapaian Indikator Seluruh Kegiatan di Sekretariat}}{\sum \text{Kegiatan di Sekretariat}}$	100,00	85,00					Program Pelayanan Kesekretariatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN (BARU)

Sasaran									
Uraian	Indikator Sasaran dan indikator Program	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target				Program
			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024	
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	1. Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	$\frac{\sum \text{Indikator Kinerja Outcome yang tercapai}}{\sum \text{Indikator Kinerja Outcome}} \times 100\%$			85,00	87,00	88,00	88,00	
	1. Persentase Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja berkualitas baik}}{\sum \text{Perangkat Daerah}}$			73,08	98,08	100,00	80,00	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	2) Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	$\frac{\sum \text{Indikator RPJMD yang capaiannya sama dengan atau lebih dari 80\%}}{\sum \text{Seluruh Indikator RPJMD}} \times 100\%$	80,00	67,50	79,00	80,00	81,00	79,00	
	1. Rata-rata persentase keselarasan antar dokumen perencanaan dan perencanaan dengan pelaksanaan	(1) $\frac{\sum \text{Program, indikator program, target kinerja dan rencana pendanaan di RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\sum \text{Seluruh program, indikator program, target kinerja dan rencana pendanaan di RPJMD}} \times 100\%$			79,00	80,00	88,00	88,00	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		(2) $\frac{\sum \text{Program, indikator program, target kinerja dan pendanaan di DPA yang selaras dengan RKPD}}{\sum \text{Seluruh program, indikator program, target kinerja dan rencana pendanaan di RKPD}} \times 100\%$							
		(3) $\frac{\% \text{ Keselarasan antar dokumen perencanaan} + \% \text{ keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan (DPA)}}{2}$							
Terpenuhi Pelayanannya Pelayanan Kesekretariatan	3) Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	82,32	78,17	87,00	88,00	89,00	87,00	
	1. Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	$\frac{\sum \text{Persentase capaian indikator kegiatan Sekretariat}}{\sum \text{indikator kegiatan Sekretariat}}$			96,00	96,50	97,00	97,50	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA PERANGKAT
DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 35A Telp. (031) 3095482 Fax. (031) 3096482 Kode Pos 69116
Website : bappeda.bangkalankab.go.id | Email : bappeda@bangkalankab.co.id
BANGKALAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO SETIAWAN, S.Si., MT
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. MOHNI, MM
Jabatan : Plt. Bupati Bangkalan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 11 Noember 2022

PIHAK KEDUA

Drs. MOHNI, MM

PIHAK PERTAMA

EKO SETIAWAN, S.Si., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19751121 200312 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Rata-Rata Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Program	87%
		Persentase Indikator Kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	80%
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	88%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.838.672.085	APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.848.300.150	APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.062.239.000	APBD

Bangkalan, 11 November 2022

Pt. BUPATI BANGKALAN



Drs. MOHNI, MM

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN



EKO SETIAWAN, S.Si., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19751121 200312 1 003